

**JEPANG MENUTUP DIRI DARI DUNIA LUAR SEJAK TAHUN 1633**

**Dedi Hardiyanto<sup>1</sup>, Teuku Ryan Syuhufi Fhazlan<sup>2</sup>, Muhammad Romadhoni Azizi<sup>3</sup>,  
Roihan Waladi<sup>4</sup>, Rifqi Rusdan Shahib<sup>5</sup>, Fatonah<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Jambi

[hardiyantodedi81@gmail.com](mailto:hardiyantodedi81@gmail.com)<sup>1</sup>, [teuku123ryan@gmail.com](mailto:teuku123ryan@gmail.com)<sup>2</sup>, [dhoni120923@gmail.com](mailto:dhoni120923@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[waladiroihan@gmail.com](mailto:waladiroihan@gmail.com)<sup>4</sup>, [rifqirusdan21@gmail.com](mailto:rifqirusdan21@gmail.com)<sup>5</sup>, [fatolah.nurdin@unja.ac.id](mailto:fatolah.nurdin@unja.ac.id)<sup>6</sup>

**Abstrak**

Pada awal abad ke-17, Jepang mengambil langkah besar yang membedakannya dari banyak negara lain di dunia: menutup diri dari hubungan dengan bangsa asing. Kebijakan ini dikenal sebagai *Sakoku*, yang secara resmi diberlakukan mulai tahun 1633 oleh Shogun Tokugawa Iemitsu. Penutupan ini bukan semata-mata tindakan politik biasa, melainkan strategi besar untuk menjaga stabilitas negara dari pengaruh asing yang dianggap mengancam, khususnya penyebaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa Barat. Penelitian ini berusaha menelusuri latar belakang kebijakan tersebut, bagaimana kebijakan ini dijalankan selama lebih dari dua abad, serta dampaknya bagi masyarakat Jepang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Jepang tertutup dari dunia luar, kehidupan di dalam negeri justru berkembang secara unik. Sistem sosial yang hierarkis, nilai-nilai etika samurai (Bushido), serta ajaran Konfusianisme dan Shinto memperkuat identitas nasional dan loyalitas masyarakat terhadap negara dan kaisar. Di sisi lain, isolasi ini menyebabkan Jepang tertinggal dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan negara-negara Barat. Kebijakan ini akhirnya berakhir pada tahun 1854 ketika tekanan dari negara-negara asing, terutama Amerika Serikat, memaksa Jepang membuka pelabuhannya. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan isolasi tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah politik Jepang, tetapi juga turut membentuk karakter dan nasionalisme bangsa Jepang yang bertahan hingga era modern.

**Kata Kunci:** Jepang, Sakoku, Tokugawa, Isolasi, Nasionalisme, Hubungan Internasional.

**Abstract**

*In the early 17th century, Japan took a major step that set it apart from many other countries*

*in the world: it closed itself off from foreign relations. This policy, known as Sakoku, was officially implemented in 1633 by Shogun Tokugawa Iemitsu. This closure was not merely a political act, but a grand strategy to maintain the stability of the country from foreign influences that were considered threatening, especially the spread of Christianity brought by Westerners. This study attempts to trace the background of this policy, how it was implemented for more than two centuries, and its impact on Japanese society. Using a qualitative approach and descriptive-analytical methods, this study finds that although Japan was closed off from the outside world, life within the country developed in a unique way. The hierarchical social system, samurai ethical values (Bushido), and Confucian and Shinto teachings strengthened national identity and people's loyalty to the state and the emperor. On the other hand, this isolation caused Japan to lag behind in technology and science compared to Western countries. This policy finally ended in 1854 when pressure from foreign countries, especially the United States, forced Japan to open its ports. This study shows that the policy of isolation was not only an important part of Japanese political history, but also helped shape the character and nationalism of the Japanese people that has survived into the modern era.*

**Keywords:** Japan, Sakoku, Tokugawa, Isolation, Nationalism, International Relations.

### PENDAHULUAN

Pada abad ke-17, Jepang mengalami titik balik penting dalam sejarah politik dan sosialnya, ditandai dengan keputusan besar untuk menutup diri dari pengaruh luar. Kebijakan ini dikenal dengan istilah *Sakoku*, yang secara harfiah berarti “negara tertutup.” Kebijakan tersebut secara resmi diterapkan pada tahun 1633 oleh Shogun Tokugawa Iemitsu, pemimpin ketiga dari Keshogunan Tokugawa yang berkuasa pada masa Edo. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas meningkatnya kehadiran bangsa-bangsa asing, terutama dari Eropa, yang tidak hanya membawa kepentingan dagang tetapi juga menyebarkan agama Kristen. Pemerintah Tokugawa melihat penyebaran agama asing ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan politik yang telah dibangun dengan susah payah, terutama dalam masyarakat yang dijalankan berdasarkan prinsip hierarki dan ketaatan mutlak kepada penguasa.

Melalui *Sakoku*, Jepang menutup hampir seluruh akses bagi bangsa asing, kecuali untuk dua negara yang diizinkan tetap berdagang dengan pengawasan ketat: Cina dan Belanda. Kedua negara ini hanya diperbolehkan bertransaksi di satu lokasi, yakni pelabuhan Nagasaki dan pulau

buatan kecil yang disebut *Dezima*. Dalam waktu yang sama, warga Jepang pun dilarang untuk bepergian ke luar negeri, dan mereka yang melanggar aturan ini dapat dihukum mati. Kebijakan ini berlaku selama lebih dari dua abad dan menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter bangsa Jepang.

Dampak dari kebijakan isolasi ini terasa dalam hampir semua aspek kehidupan. Dari segi politik, keluarga Tokugawa berhasil memperkuat kekuasaan pusat dan menciptakan stabilitas internal yang langgeng dengan mengurangi potensi pemberontakan dan intervensi asing. Di bidang sosial, masyarakat Jepang hidup dalam tatanan yang sangat terstruktur. Sistem kelas yang ketat membuat mobilitas sosial hampir mustahil, dan nilai-nilai seperti kesetiaan, hormat kepada atasan, serta pengabdian mutlak menjadi norma kehidupan sehari-hari. Sementara itu, secara ekonomi, walau terputus dari arus perdagangan global, Jepang mampu mempertahankan pertumbuhan produksi dalam negeri dan mengembangkan sistem konsumsi serta distribusi yang mandiri. Namun, dampak negatifnya pun tak bisa diabaikan: Jepang menjadi tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada masa itu tengah berkembang pesat di Eropa melalui Revolusi Industri.

Tulisan ini berangkat dari keingintahuan tentang bagaimana sebuah negara bisa begitu lama bertahan dalam keterisolasian, dan apa saja konsekuensi dari pilihan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam latar belakang diberlakukannya kebijakan isolasi oleh pemerintah Jepang pada tahun 1633, serta menganalisis dampak politik, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas bagaimana Jepang tetap menjaga relasi terbatas dengan Cina dan Belanda di tengah kebijakan isolasi yang ketat. Dengan menelusuri dinamika hubungan luar negeri Jepang pada masa Edo, tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana kebijakan *Sakoku* tidak hanya berfungsi sebagai tameng dari pengaruh asing, tetapi juga sebagai alat pembentuk identitas nasional yang bertahan hingga memasuki era modern.<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah karena objek kajiannya berkaitan dengan peristiwa masa lampau, yaitu kebijakan penutupan diri (*Sakoku*) yang diterapkan oleh

---

<sup>1</sup> Widarahesty dan Ayu, "Pengaruh Politik Isolasi (*Sakoku*) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 1 (2011): 46–62.

pemerintah Jepang sejak tahun 1633. Metode sejarah bertujuan untuk merekonstruksi fakta-fakta masa lalu secara sistematis dan kritis agar dapat dipahami secara utuh dalam konteks waktu dan tempat terjadinya peristiwa.

Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah ini meliputi empat tahap utama yaitu: (1)Heuristik (pengumpulan sumber) Tahap ini dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber sejarah yang relevan, baik primer maupun sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi, catatan pemerintahan Tokugawa, arsip diplomatik, dan kesaksian sejarah dari periode Edo. Sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan kajian terdahulu yang membahas kebijakan isolasi Jepang serta dampaknya terhadap politik, sosial, ekonomi, dan hubungan luar negeri Jepang. (2)Verifikasi (kritik sumber) Setelah data dikumpulkan, dilakukan kritik terhadap keabsahan dan keandalan sumber, baik dari segi internal (isi dan konsistensi data) maupun eksternal (asal-usul dan otentisitas dokumen). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (3)Interpretasi (penafsiran) Pada tahap ini, data sejarah dianalisis secara mendalam dengan menafsirkan makna, hubungan sebab-akibat, serta konteks dari kebijakan isolasi yang diberlakukan oleh Jepang. Interpretasi dilakukan untuk memahami motif kebijakan, dampaknya terhadap struktur sosial-politik Jepang, serta bagaimana Jepang tetap menjalin hubungan terbatas dengan Cina dan Belanda di tengah penutupan diri. (4)Historiografi (penulisan sejarah) Tahap akhir adalah penyusunan narasi sejarah berdasarkan data yang telah diverifikasi dan ditafsirkan. Penulisan dilakukan secara kronologis dan tematik untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai dinamika kebijakan isolasi Jepang sejak tahun 1633 hingga berakhirnya kebijakan tersebut pada pertengahan abad ke-19.

Dengan menerapkan metode sejarah ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai kebijakan isolasi Jepang serta implikasinya dalam konteks sejarah nasional dan internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Sakoku 1633

Jepang mengambil langkah besar dan menentukan dalam sejarah politiknya dengan memberlakukan kebijakan penutupan diri dari dunia luar, yang kemudian dikenal dengan nama

*Sakoku*. Kebijakan ini secara resmi dimulai pada tahun 1633, di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu, pemimpin ketiga dari dinasti Tokugawa yang berkuasa pada masa Edo. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan pemerintah Tokugawa pada waktu itu diliputi kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh asing, khususnya dari bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol yang datang membawa agama Kristen melalui aktivitas perdagangan dan misi keagamaan mereka.<sup>2</sup>

Tujuan utama dari Sakoku adalah membatasi pengaruh asing yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik, tatanan sosial, dan budaya tradisional Jepang. Dalam konteks global, kebijakan ini menandai sikap berbeda Jepang dari negara-negara Asia lainnya yang mengalami penetrasi kolonialisme Barat secara masif. Latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari meningkatnya kehadiran bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol, yang tidak hanya datang untuk berdagang tetapi juga menyebarkan agama Katolik melalui para misionaris. Pihak Tokugawa melihat misi agama ini sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik dan identitas budaya Jepang. Oleh karena itu, selain melarang aktivitas misionaris, pemerintah juga melarang rakyat Jepang keluar negeri, dan siapa pun yang kembali dari luar negeri akan dikenai hukuman mati. Begitu pula sebaliknya, orang asing dilarang memasuki wilayah Jepang tanpa izin resmi.

Dalam masa kebijakan Sakoku selama Dua abad itu Jepang berhasil mengembangkan identitas nasional yang kuat, menjaga kestabilan politik, dan mempertahankan struktur sosial yang hierarkis. Namun, di sisi lain, isolasi ini membuat Jepang tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara Barat yang tengah berkembang pesat selama Revolusi Industri.<sup>3</sup>

Dengan demikian, kebijakan Sakoku merupakan bentuk respons strategis Jepang dalam menjaga kedaulatan nasional dan budaya dari penetrasi asing. Meskipun berhasil mempertahankan stabilitas internal dalam jangka panjang, kebijakan ini pada akhirnya harus diakhiri karena perubahan konstelasi global. Pengalaman Jepang ini menjadi pelajaran penting dalam memahami dinamika antara keterbukaan dan perlindungan terhadap identitas nasional di tengah arus perubahan dunia.

Masuknya agama Kristen dianggap berpotensi mengguncang tatanan sosial yang selama ini dibangun secara ketat oleh pemerintah. Dalam pandangan Tokugawa, agama ini dapat

---

<sup>2</sup> Widarahesty dan Ayu.

<sup>3</sup> Azizah dan Fatonah, Wendy Aulia Putri, Rahma Fauziah, Sevina Rahmawati, "RESTORASI MEIJI, MODERNISASI JEPANG Azizah1," 6, no. 2 (2016): 1–23.

merusak struktur masyarakat feodal yang telah diatur secara hierarkis, di mana kesetiaan kepada penguasa dan sistem kasta menjadi fondasi utama. Ancaman ini bukan hanya dipandang sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai ancaman politik yang dapat melemahkan kendali negara atas rakyatnya. Bahkan sebelum masa Tokugawa, Toyotomi Hideyoshi telah lebih dahulu menunjukkan kekhawatirannya dengan mulai membatasi pengaruh asing dan melarang penyebaran agama Kristen.

Tokugawa Iemitsu tidak hanya melanjutkan langkah pendahulunya, tetapi juga memperketatnya. Ia mengeluarkan peraturan yang melarang rakyat Jepang melakukan perjalanan ke luar negeri, dan menetapkan bahwa hanya pedagang dari Cina dan Belanda yang diperbolehkan berdagang di wilayah Jepang, itupun hanya melalui pelabuhan tertentu, yakni Nagasaki dan pulau buatan Dezima. Dengan kebijakan ini, Jepang secara efektif menutup diri dari dunia luar selama lebih dari dua abad.

Di balik semua itu, kebijakan Sakoku bukan sekadar upaya perlindungan dari pengaruh asing. Ia juga merupakan strategi politik yang cermat dari pemerintahan militer Tokugawa, atau *bakufu*, untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan dan menghindari potensi gangguan dari luar. Dengan membatasi informasi, ideologi, dan teknologi yang masuk, pemerintah bisa lebih mudah mengendalikan masyarakat dan memelihara ketertiban. Isolasi ini memungkinkan Jepang menjaga kesetiaan rakyat terhadap pemimpinnya serta memperkuat identitas nasional yang berbeda dari dunia luar.<sup>4</sup>

Melalui kebijakan *Sakoku*, pemerintah melarang keras rakyat Jepang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, dan sebaliknya, membatasi akses orang asing ke wilayah Jepang. Pelanggaran terhadap peraturan ini bahkan dapat dihukum mati. Perdagangan internasional dibatasi hanya kepada bangsa Cina dan Belanda, yang dinilai tidak memiliki kepentingan menyebarkan agama. Perdagangan ini pun hanya dilakukan melalui pelabuhan khusus di Nagasaki, yaitu pulau buatan Dejima. Selain itu, interaksi terbatas dilakukan melalui beberapa jalur khusus seperti perdagangan dengan Korea melalui wilayah Tsushima, dengan suku Ainu di Hokkaido melalui Matsumae, dan dengan Kerajaan Ryukyu (Okinawa) melalui domain Satsuma. Sistem ini memungkinkan Jepang tetap berhubungan secara terbatas dengan dunia luar, tetapi dengan pengawasan ketat dan tanpa keterlibatan budaya atau ideologi asing yang

---

<sup>4</sup>Widarahesty dan Ayu, "Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II."

dianggap berbahaya.

Kebijakan ini berlangsung selama lebih dari dua abad, dari tahun 1633 hingga 1854, dan meskipun tampak seperti bentuk isolasi total, Jepang sebenarnya masih menjalankan hubungan luar negeri dalam lingkup terbatas dan terkontrol. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari pengaruh kolonialisme dan mempertahankan nilai-nilai asli Jepang. Dalam praktiknya, *Sakoku* tidak hanya berfungsi sebagai proteksi politik, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang patuh, teratur, dan setia pada kekuasaan shogun. Kebijakan ini pun mencerminkan semangat mempertahankan kemandirian dan identitas budaya di tengah gelombang globalisasi awal yang mulai menjangkau Asia Timur. Sumber jurnal juga mencatat bahwa meskipun kebijakan ini memiliki sisi negatif, seperti keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, *Sakoku* turut menjaga kesinambungan budaya dan memperkuat struktur sosial-politik Jepang hingga memasuki era modern.<sup>5</sup>

## Dampak Kebijakan Sakoku terhadap Kehidupan Masyarakat Jepang

Kebijakan isolasi atau *Sakoku* yang diterapkan oleh pemerintahan Tokugawa sejak tahun 1633 hingga 1853 memberikan dampak besar bagi masyarakat Jepang. Dampaknya terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, hingga keagamaan. Kebijakan ini pada dasarnya muncul dari rasa khawatir pemerintah terhadap pengaruh bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yang datang ke Jepang tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga ajaran agama Kristen serta nilai-nilai asing lainnya. Bagi pemerintah Jepang saat itu, kehadiran agama Kristen dianggap mengancam stabilitas negara karena bisa menggoyahkan sistem kekuasaan dan budaya yang sudah lama mereka bangun. Dalam sistem kepercayaan Shinto, kaisar dipandang sebagai keturunan dewa matahari, dan tatanan politik dibentuk berdasarkan keyakinan spiritual ini. Sementara itu, umat Kristen hanya menyembah Tuhan dan tidak mengakui kekuasaan kaisar sebagai sesuatu yang sakral. Hal ini membuat pemerintah melihat agama Kristen sebagai sesuatu yang berbahaya secara ideologis dan politis.

Dari sisi sosial, kebijakan ini menciptakan tekanan berat bagi para penganut Kristen di Jepang. Banyak dari mereka yang dipaksa meninggalkan keyakinannya. Salah satu cara pemerintah untuk menekan mereka adalah dengan memaksa warga menginjak gambar Yesus

---

<sup>5</sup> Y H Waruwu dan R Arfianty, "ANALISIS DAMPAK POLITIK ISOLASI ( SAKOKU ) BAGI KEHIDUPAN" 10, no. 3 (2024): 172–82.

atau Bunda Maria—sebuah praktik yang disebut *fumie*—untuk membuktikan bahwa mereka bukan pemeluk agama Kristen. Orang-orang yang menolak akan disiksa, dipenjara, atau bahkan dieksekusi. Meski begitu, sebagian umat Kristen tetap bertahan dengan menjalankan kepercayaan mereka secara sembunyi-sembunyi. Mereka membentuk kelompok kecil yang disebut *kakure kirishitan*, yaitu komunitas Kristen tersembunyi yang menyamarkan praktik ibadah mereka agar tidak diketahui oleh pemerintah. Mereka beribadah secara diam-diam dan menyamarkan simbol-simbol kekristenan agar tampak seperti bagian dari agama Buddha. Kondisi ini menciptakan suasana penuh ketakutan, namun juga menunjukkan bagaimana agama dapat tetap bertahan meski ditekan dengan keras.

Di bidang ekonomi, meskipun Jepang menutup diri dari kebanyakan negara asing, bukan berarti seluruh hubungan perdagangan diputus total. Pemerintah masih membuka jalur perdagangan terbatas dengan negara-negara yang dianggap tidak menyebarkan agama, seperti Cina dan Belanda. Perdagangan ini dilakukan secara ketat dan terbatas di pelabuhan Dejima di Nagasaki. Dengan cara ini, Jepang tetap bisa mendapatkan barang-barang penting seperti senjata api dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi meskipun Jepang mengisolasi diri secara politik dan budaya, secara ekonomi mereka tetap menjaga kelangsungan hidup melalui mekanisme dagang yang terkontrol.

Secara politik, kebijakan Sakoku memperkuat kekuasaan shogun Tokugawa dan memperkokoh sistem feodal yang mereka bangun. Dengan menutup akses dari luar, pemerintah bisa menjaga stabilitas dalam negeri, mengawasi pergerakan para bangsawan daerah (*daimyo*), dan mencegah pengaruh luar yang bisa memicu pemberontakan atau perpecahan. Sistem *sankin koutai*, yakni kewajiban para *daimyo* untuk tinggal bergantian di Edo (sekarang Tokyo), diberlakukan untuk memastikan loyalitas mereka kepada shogun. Struktur masyarakat menjadi kaku dengan pelapisan kelas yang jelas dan pengawasan sosial yang ketat.

Secara keseluruhan, kebijakan isolasi ini membawa konsekuensi ganda bagi Jepang. Di satu sisi, kebijakan tersebut berhasil menciptakan stabilitas politik dan menjaga budaya lokal dari campur tangan asing. Namun di sisi lain, muncul tekanan sosial yang besar, penindasan terhadap kelompok keagamaan tertentu, dan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat. Bahkan setelah kebijakan ini berakhir, dampaknya masih bisa dirasakan dalam bentuk warisan budaya serta sisa-sisa komunitas Kristen tersembunyi. Kebijakan Sakoku mencerminkan bagaimana sebuah negara berupaya melindungi identitas nasionalnya di tengah ancaman

globalisasi dini meski harus dibayar mahal oleh sebagian warganya.<sup>6</sup>

### Hubungan Jepang dengan Cina dan Belanda di Tengah Isolasi

Sejak diberlakukannya kebijakan isolasi atau Sakoku pada tahun 1639, Jepang menutup hampir seluruh akses bangsa asing ke wilayahnya. Namun demikian, pemerintah Tokugawa tetap mempertahankan hubungan terbatas dengan dua negara asing, yakni Cina dan Belanda. Pemilihan dua bangsa ini dilandasi oleh pertimbangan ideologis dan politis. Cina memiliki hubungan historis dan budaya yang panjang dengan Jepang, sementara Belanda dianggap tidak membawa misi penyebaran agama Kristen seperti Portugis dan Spanyol yang telah diusir sebelumnya. Karena itu, kedua negara ini diizinkan berdagang melalui pelabuhan Nagasaki dalam sistem yang sangat terkontrol.

Meskipun disebut sebagai kebijakan isolasi total, Jepang tidak sepenuhnya menutup diri dari dunia luar. Interaksi perdagangan tetap berlangsung namun secara sangat terbatas dan dikontrol ketat. Perdagangan hanya diperbolehkan melalui beberapa pintu masuk tertentu: dengan Belanda melalui pelabuhan Dejima di Nagasaki, dengan Cina melalui jalur perdagangan khusus juga di Nagasaki, dengan Dinasti Joseon Korea melalui klan So di Tsushima, serta dengan suku Ainu melalui Hokkaido. Belanda, yang dianggap netral karena tidak aktif menyebarkan agama, diizinkan berdagang dengan pengawasan ketat, menjadikannya satu-satunya bangsa Eropa yang bisa tetap berinteraksi dengan Jepang selama masa Sakoku.<sup>7</sup>

Melalui jalur ini, tidak hanya barang-barang dagangan yang masuk, tetapi juga ilmu pengetahuan Barat. Dari sinilah muncul gerakan Rangaku, yaitu studi tentang ilmu Barat dalam bahasa Belanda. Berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, astronomi, dan teknologi mulai dipelajari dan dikembangkan oleh intelektual Jepang, terutama setelah didukung oleh Shogun Tokugawa Yoshimune. Ia membuka ruang bagi penerjemahan buku dan pembelajaran Bahasa.

Belanda sebagai jendela menuju dunia pengetahuan asing. Meski diberi akses terbatas, keberadaan Belanda diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah Tokugawa. Kepala perwakilan VOC hanya boleh tinggal dalam waktu tertentu dan tidak diizinkan mempelajari bahasa Jepang secara mendalam. Pernikahan dengan perempuan Jepang juga tidak dibolehkan secara resmi, kecuali dengan perempuan tuna susila. Langkah ini

---

<sup>6</sup> Gabriella Btari Putri dan others, "Pengaruh Kebijakan Sakoku Pada Agama Kristen Di Jepang," *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha* 9, no. 3 (2023): 183–90.

<sup>7</sup> Azizah dan , Wendy Aulia Putri, Rahma Fauziah, Sevina Rahmawati, "RESTORASI MEIJI, MODERNISASI JEPANG Azizah1,."

menunjukkan strategi Tokugawa dalam memanfaatkan keuntungan perdagangan dan ilmu dari Barat, tanpa harus membuka peluang masuknya pengaruh ideologis atau sosial-politik yang dapat mengguncang tatanan negara. Bahkan, bantuan Belanda kepada Jepang dalam menumpas pemberontakan Shimabara turut memperkuat kepercayaan pemerintah kepada VOC.

Sementara itu, hubungan Jepang dengan Cina tetap berlangsung dalam bentuk perdagangan barang-barang penting seperti tekstil, obat-obatan, dan rempah-rempah. Selain itu, Cina juga menjadi sumber utama ajaran Konfusianisme dan karya-karya klasik yang membentuk nilai-nilai etika, pendidikan, dan moral dalam masyarakat Jepang pada masa Edo. Walaupun demikian, seiring berkembangnya Rangaku, orientasi Jepang mulai bergeser secara perlahan dari dominasi budaya Cina menuju pengaruh keilmuan Barat melalui Belanda. Relasi Jepang dengan Cina dan Belanda selama era Sakoku mencerminkan strategi terbuka secara selektif yang dijalankan oleh pemerintah Tokugawa. Di satu sisi, negara menutup diri dari pengaruh ideologis dan sosial bangsa asing demi menjaga stabilitas dan identitas nasional. Di sisi lain, Jepang tetap membuka ruang yang kecil namun vital untuk menyerap pengetahuan dan kebutuhan perdagangan yang mendesak. Dalam konteks ini, Dejima menjadi simbol keterbukaan terkendali, sebuah jendela kecil menuju dunia luar yang akhirnya turut mempersiapkan Jepang menghadapi era modernisasi pada abad ke-19.<sup>8</sup>

### **Akhir Kebijakan Sakoku**

Akhir dari kebijakan isolasi Jepang atau Sakoku terjadi pada pertengahan abad ke-19, tepatnya setelah kedatangan ekspedisi dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh Komodor Matthew Perry pada 8 Juli 1853. Perry datang membawa empat kapal perang, yang kemudian dikenal sebagai "kapal hitam", dan mendarat di pelabuhan Jepang dengan tujuan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan antara Jepang dan Amerika Serikat. Kehadiran Perry dan kekuatan militer yang menyertainya memberikan tekanan besar kepada pemerintah Jepang, yang saat itu masih berada di bawah kendali Keshogunan Tokugawa. Jepang tidak dapat mengabaikan kekuatan negara-negara Barat yang semakin mendesak untuk masuk ke wilayah Asia, sehingga akhirnya dipaksa membuka diri.

Situasi ini memuncak pada tahun 1854 ketika Jepang menandatangani Perjanjian Shimoda

---

<sup>8</sup> Bambang Wibawarta, "Dejima" 10, no. 2 (2008).

dengan Amerika Serikat. Isi pokok dari perjanjian ini adalah membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk kepentingan perdagangan internasional. Dengan demikian, kebijakan Sakoku yang telah berlangsung selama lebih dari dua abad secara resmi berakhir. Pembukaan pelabuhan menandai dimulainya era baru dalam sejarah Jepang, yaitu era keterbukaan dan modernisasi yang lebih intensif.

Berakhirnya Sakoku tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tekanan eksternal yang kuat serta kesadaran dari sebagian elit Jepang bahwa mereka tidak akan mampu mempertahankan kekuatan negara jika terus terisolasi dari perkembangan dunia luar. Perubahan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Jepang, yang kemudian dilanjutkan dengan dimulainya Restorasi Meiji pada tahun 1868. Dalam masa pemerintahan Kaisar Meiji, Jepang melakukan transformasi besar-besaran dari negara feodal yang tertutup menjadi negara industri yang modern dan sejajar dengan kekuatan-kekuatan Barat. Restorasi Meiji mencakup reformasi di berbagai bidang seperti militer, ekonomi, pendidikan, serta sistem pemerintahan, yang menjadikan Jepang sebagai salah satu kekuatan besar di Asia dan dunia pada awal abad ke-20. Dengan demikian, akhir dari Sakoku bukan hanya membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan Jepang sebagai negara modern dan imperialis di kemudian hari.<sup>9</sup>

### KESIMPULAN

Kebijakan Sakoku yang diberlakukan oleh pemerintahan Tokugawa sejak tahun 1633 merupakan kebijakan politik yang sangat ketat dan disengaja, dirancang untuk melindungi Jepang dari pengaruh luar, terutama dari bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Kedua bangsa ini, selain aktif berdagang, juga membawa misi keagamaan dengan menyebarkan ajaran Kristen yang dianggap oleh penguasa Jepang saat itu berbahaya bagi kestabilan negara. Tokugawa Iemitsu, sebagai shogun ketiga dari Keshogunan Tokugawa, memandang masuknya agama Kristen sebagai ancaman serius terhadap struktur sosial dan kekuasaan yang telah dibangun secara feodal dan hierarkis. Ia khawatir bahwa ajaran baru ini dapat menggeser loyalitas rakyat dari pemimpin feodal kepada otoritas keagamaan asing, dan bahkan berpotensi melahirkan pemberontakan.

---

<sup>9</sup> Karlina Kusuma Putri, Putut Wisnu Kurniawan, dan Ozi Hendratama, "Pengaruh Propaganda Jepang Terhadap Masyarakat Indonesia Tahun 1942-1945," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2023): 231–41, <http://eskripsi.stkipgribl.ac.id/>.

Sebagai tindak lanjut dari kekhawatiran tersebut, Iemitsu memperketat peraturan dengan melarang keras warga Jepang untuk bepergian ke luar negeri dan melarang siapa pun yang telah tinggal di luar negeri untuk kembali. Kontak dengan dunia luar dibatasi seminimal mungkin. Hanya dua bangsa asing yang tetap diizinkan melakukan hubungan dagang dengan Jepang, yaitu Cina dan Belanda. Namun, hubungan ini pun dijalankan secara sangat terbatas dan diawasi ketat, hanya melalui pelabuhan Nagasaki, khususnya pulau buatan Dejima, yang secara geografis dan administratif dipisahkan dari daratan utama Jepang. Hal ini dilakukan agar interaksi budaya, sosial, dan ideologis dapat dibatasi, sehingga nilai-nilai asing tidak meresap ke dalam masyarakat Jepang.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan stabilitas internal yang kokoh. Dengan membatasi arus informasi, barang, dan manusia dari luar, pemerintahan Tokugawa dapat mengendalikan dinamika dalam negeri dengan lebih mudah. Mereka bisa menjaga agar sistem kelas sosial tetap utuh, budaya lokal berkembang tanpa campur tangan asing, dan masyarakat tidak terpengaruh oleh perubahan ideologi yang dapat melemahkan kekuasaan shogun. Dalam konteks ini, Sakoku bukan sekadar kebijakan penutupan fisik terhadap dunia luar, melainkan strategi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang patuh, homogen, dan loyal terhadap pemerintah.

Namun, kebijakan ini juga melahirkan berbagai konsekuensi bagi masyarakat. Tekanan sosial meningkat, terutama terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang, seperti umat Kristen. Mereka yang ketahuan memeluk agama Kristen dianiaya, dipaksa meninggalkan kepercayaan mereka, bahkan dieksekusi. Beberapa kelompok Kristen akhirnya menjalankan ibadah mereka secara rahasia dan membentuk komunitas bawah tanah yang dikenal sebagai kakure kirishitan. Selain itu, karena terbatasnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar, Jepang mengalami keterlambatan dalam perkembangan sains dan inovasi dibandingkan dengan negara-negara Barat yang tengah memasuki era revolusi industri.

Meski demikian, hubungan dengan Cina dan Belanda tetap menjadi celah penting yang memungkinkan masuknya pengetahuan luar. Lewat interaksi terbatas ini, Jepang mulai mengenal dan mempelajari ilmu Barat, terutama dalam bidang kedokteran, astronomi, dan teknik, melalui gerakan yang dikenal sebagai Rangaku atau studi Belanda. Pemerintah Tokugawa, khususnya di bawah kepemimpinan Tokugawa Yoshimune, bahkan membuka pintu selektif terhadap penerjemahan buku-buku asing. Upaya ini menjadi fondasi bagi kebangkitan

intelektual Jepang di masa depan.

Secara keseluruhan, Sakoku bukan hanya kebijakan isolasi, melainkan juga simbol dari strategi perlindungan identitas nasional dan penguatan kontrol internal. Dalam jangka pendek, kebijakan ini sukses mempertahankan kestabilan politik dan kelestarian budaya lokal. Namun dalam jangka panjang, ia juga menimbulkan tantangan besar yang harus dihadapi Jepang saat mulai membuka diri kembali di pertengahan abad ke-19. Sakoku mencerminkan bagaimana Jepang berusaha bertahan dari tekanan globalisasi dini dengan cara yang sangat khas dan terstruktur, sekaligus mempersiapkan diri untuk transformasi besar yang akan datang pada era Restorasi Meiji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, dan Fatonah, Wendy Aulia Putri, Rahma Fauziah, Sevina Rahmawati. "RESTORASI MEIJI, MODERNISASI JEPANG Azizah1," 6, no. 2 (2016): 1–23.
- Putri, Gabriella Btari, dan others. "Pengaruh Kebijakan Sakoku Pada Agama Kristen Di Jepang." *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha* 9, no. 3 (2023): 183–90.
- Putri, Karlina Kusuma, Putut Wisnu Kurniawan, dan Ozi Hendratama. "Pengaruh Propaganda Jepang Terhadap Masyarakat Indonesia Tahun 1942-1945." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2023): 231–41. <http://eskripsi.stkipgribl.ac.id/>.
- Waruwu, Y H, dan R Arfianty. "ANALISIS DAMPAK POLITIK ISOLASI ( SAKOKU ) BAGI KEHIDUPAN" 10, no. 3 (2024): 172–82.
- Wibawarta, Bambang. "Dejima" 10, no. 2 (2008).
- Widarahesty dan Ayu. "Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi Tentang Politik Jepang dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 1 (2011): 46–62.